

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN LUAR NEGERI RUSIA UNTUK MENDORONG PEMBENTUKAN *SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION*

Kebijakan luar negeri Rusia untuk mendorong pembentukan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO) didasarkan pada berbagai kondisi dan pertimbangan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi munculnya kebijakan tersebut. Dalam upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian pada penelitian ini, bab ini akan memuat pembahasan mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang melatarbelakangi kebijakan Rusia untuk membentuk SCO.

Faktor-faktor internal atau domestik yang dimaksudkan dalam bab ini adalah ancaman atas kepentingan Rusia dalam wilayah keamanan dalam negerinya, struktur geografis serta topografis negara tersebut, terutama berkenaan dengan akses terhadap sumber daya minyak dan atribut nasional Rusia. Atribut nasional dalam hal ini terutama berkenaan dengan cara pandang bangsa Rusia atas diri dan bangsanya. Faktor-faktor eksternal dimaksud adalah kondisi dunia dan kawasan *post-Soviet States* area pasca Perang Dingin, hubungan Rusia dan negara-negara *post-Soviet States*, persepsi ancaman atas keberadaan aktor-aktor eksternal di kawasan *post-Soviet States*, serta faktor akses sumber energi di kawasan *post-Soviet States* yang menjadi salah satu perhatian utama Rusia di kawasan tersebut.

Pembahasan pada bab ini akan diawali dengan pembahasan mengenai ancaman keamanan domestik Rusia, terutama yang disebabkan oleh gerakan separatisme dan ekstrimisme agama di wilayah Dagestan dan Chechnya. Pembahasan akan diawali dengan deskripsi singkat mengenai sejarah konflik dan akar penyebab munculnya gerakan separatisme wilayah-wilayah otoritas yang dihuni oleh warga mayoritas Muslim di Rusia.

A. Faktor Domestik

A.1. Rusia dan Masalah Keamanan Dalam Negeri

Pada tanggal 10 Agustus 1998 *Islamic Shura' of Dagestan* (Majelis Syura' Islam Dagestan) memproklamkan kemerdekaan Dagestan dan, pada

kesempatan yang sama, mendeklarasikan berdirinya Negara Islam Dagestan dengan Syariat Islam sebagai landasan negaranya. "Atas nama Allah Yang Maha Pemurah, yang berbelas kasihan! Kami kaum Muslim Dagestan secara resmi menyatakan kemerdekaan kami dan pemulihan kembali Negara Islam Dagestan. Semoga Allah melindungi kita, *Allahu Akbar!*"¹⁰⁷

Pernyataan kemerdekaan Republik Dagestan, sebagai salah satu wilayah administratif federal di bawah kekuasaan Rusia, menghadirkan sebuah sengketa bagi pemerintah Republik Federasi Rusia. Hal tersebut semakin menegaskan anggapan yang menyatakan bahwa gerakan separatisme, khususnya yang berbasiskan pada religi tertentu, adalah merupakan sebuah ancaman nyata bagi keamanan dan integritas nasional Rusia.¹⁰⁸ Republik Dagestan adalah wilayah administratif federal kedua di Rusia, setelah Chechnya, yang memproklamirkan keinginannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman Kremlin. Gerakan separatisme yang berbasiskan kepada kesukuan dan agama adalah merupakan bahaya laten yang kerap merongrong keamanan masyarakat dan kewibawaan pemerintah Rusia hingga saat ini.

Sejatinya, gerakan separatisme-etno-religius, khususnya di wilayah Kaukasus bagian Utara, Chechnya dan Dagestan, adalah bukan merupakan masalah baru bagi Pemerintah Rusia. Bahkan sumber-sumber ancaman tersebut tidak hanya datang dari dalam wilayah teritorial Rusia, tetapi juga telah menyebar dan berakar hingga ke wilayah negara-negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah.

Gerakan separatisme-etno-religius, telah eksis dan memiliki akar semenjak era kekaisaran di Rusia, sejak dilakukannya ekspansi dan pendudukan kekaisaran Rusia atas wilayah Kaukasus pada pertengahan abad ke-18 dibawah pimpinan Tsar Peter I/Pëtr Agung. Aksi-aksi perlawanan awal di wilayah ini dimulai semenjak medio akhir abad ke-18, dipimpin oleh seorang ulama kharismatik suku Chechen, Syekh Naqshbandi Mansour Ushurma,¹⁰⁹ yang memiliki cita-cita untuk mendirikan "Negara Islam Transkaukasus" yang

¹⁰⁷ Amri Shikhsaidov, "Islam in Dagestan", <http://www.ca-c.org/dataeng/06.shikhs.shtml>, (Diakses pada tanggal 20 November 2005 pukul 01.40 WIB).

¹⁰⁸ Amina Afzal, "Russian Security Policy". *Strategic Studies*, Vol. XXV, Spring 2004, No.1. (Islamabad: The Institute of Strategic Studies, 2004), hlm. 72-74.

¹⁰⁹ Emil Souleimanov, *An Endless War: The Russian-Chechen Conflict In Perspective*, 1st Edition, (New York: Peter Lang Publishing, 2006), hlm. 33-34.

berlandaskan pada syariat Islam dan merdeka dari pendudukan pihak asing. Pada pertengahan abad ke-19, kembali muncul perlawanan besar terhadap kekuasaan Kekaisaran Rusia dengan dipimpin oleh Imam Syekh Shamil, seorang ulama Islam yang hingga kini kerap menjadi *icon* legendaris dalam setiap gerakan-gerakan perlawanan kelompok Muslim terhadap Rusia¹¹⁰.

Berkuasanya rezim komunis di Uni Soviet tidak memberikan perbaikan apapun bagi mereka yang berada di wilayah Kaukasus Utara, baik Chechnya maupun Dagestan. Tidak berbeda dengan masa-masa sebelumnya, mereka tetap hidup sebagai kelompok tertindas.¹¹¹ Pemerintah Uni Soviet melaksanakan program *Rusifikasi*, yakni penyebaran kelompok etnis, budaya, kesenian, dan bahasa Rusia ke seluruh wilayah yang berada di bawah kekuasaan Uni Soviet dengan tujuan untuk, secara perlahan-lahan, mengikis dan kemudian menghilangkan eksistensi serta identitas primordial dari suku-suku minoritas asli (*indigeous peoples*). Program ini juga memiliki maksud utama untuk memperluas pengaruh dan kontrol pemerintah pusat Soviet di wilayah-wilayah tersebut. Moskow juga menyebarkan doktrin perlawanan terhadap keberadaan agama yang mereka sebut sebagai "ideologi reaksioner",¹¹² dan memberlakukan secara nasional sekularisasi dalam setiap lini kehidupan masyarakat di Soviet. Kebijakan ini juga secara langsung mempengaruhi pola dan cara hidup masyarakat Muslim di Soviet. Al-Quran, literatur-literatur keagamaan, serta mesjid dihancurkan. Di Dagestan misalnya, jumlah mesjid menurun dari sejumlah lebih dari 1.700 Mesjid pada tahun 1917 menjadi hanya tinggal tersisa 27 bangunan pada tahun 1988.¹¹³ Ulama, guru mengaji, dan guru bahasa Arab mendapat tekanan-tekanan, dan tak jarang ditangkap serta dipenjarakan.¹¹⁴

Ketika pecah Perang Dunia II, pemimpin Uni Soviet, Joseph Stalin, memerintahkan pendeportasian hampir sejumlah satu juta penduduk etnis Chechen dan Ingush ke wilayah Asia Tengah (Kazakhstan) dan Siberia dengan

¹¹⁰ *ibid.*

¹¹¹ Larissa Khoperskaia, "The Northern Caucasus: Factors of Confrontation and Prospects for Stability", <http://www.ca-c.org/dataeng/bk02.09.khoper.shtml>, (Diakses pada tanggal 20 November 2005 pukul 01.40 WIB)

¹¹² Paham Komunisme melandaskan diri pada filsafat materialisme (kebendaan). Agama, sebagai sesuatu yang "tidak material" sifatnya, tentu tidak dapat diterima di dalam sebuah negara komunis.

¹¹³ "Dagestan, Sebuah Negeri Pegunungan", *Republika*, 22 Agustus 1999

¹¹⁴ *ibid.*

alasan bahwa mereka, etnis Chechen dan Ingush, memiliki niat untuk berkolaborasi dengan pasukan Jerman yang akan menyerbu Uni Soviet melalui perbatasan Chechnya. Sejumlah penelitian menyatakan bahwa paling sedikit 200.000 orang mati karena kedinginan, kelaparan, dan berbagai penyakit selama mereka hidup di pengasingan¹¹⁵ dan, sejumlah besar orang lainnya tewas di dalam perjalanan mereka menuju ke tempat pengasingan. Stalin lantas juga memerintahkan tentara Rusia untuk membantai ratusan ribu orang dari kedua etnis tersebut yang menunjukkan sikap tidak bersahabat dengan pemerintah pusat.¹¹⁶ Perintah Stalin tersebut memancing kemarahan penduduk di Kaukasus bagian Utara. Rakyat Dagestan bergerak melawan pemerintah Uni Soviet dalam apa yang disebut sebagai 'Perang Patriotik' yang menelan banyak korban. Bahkan beberapa pihak mengatakan, dalam 'Perang Patriotik' tersebut, semua keluarga di Dagestan kehilangan paling tidak satu orang dari anggota keluarganya.¹¹⁷

Negara-negara di wilayah Kaukasus bagian Utara sejatinya adalah negara-negara yang memiliki kekayaan hasil bumi yang cukup tinggi dan terletak pada lokasi yang strategis secara ekonomi. Dagestan dan Chechnya adalah merupakan wilayah-wilayah yang dilewati oleh saluran pipa strategis yang mengalirkan minyak mentah dari pantai-pantai laut Kaspia hingga laut Hitam (lihat gambar III.1). Selain itu, wilayah Kaukasus bagian Utara juga dikenal kaya akan gas alam dan mineral hasil tambang lainnya. Minyak, mineral hasil tambang, dan gas alam adalah merupakan komoditas ekspor migas utama yang menyangga sektor perekonomian Rusia.¹¹⁸ Meskipun memiliki semua keuntungan geografis sebagaimana dikemukakan di atas, penduduk di wilayah Kaukasus Utara merasa tidak mendapatkan keuntungan apapun. Mayoritas rakyat Chechnya dan Dagestan tetap hidup dalam kemiskinan dan kekurangan karena hampir seluruh keuntungan finansial terakumulasikan kepada pemerintah pusat di Kremlin dan hanya sejumlah kecil yang didistribusikan kepada

¹¹⁵ Ivan Sukhov, "North Caucasian Map of Threats", *Russia in Global Affairs* Vol. 3 No. 4, October-December 2005, (Moscow: Foreign Policy Research Foundation, 2005), hlm. 151-153.

¹¹⁶ Larissa Khoperskaia, *op. cit.*

¹¹⁷ "Dagestan, Sebuah Negeri Pegunungan", *op. cit.*

¹¹⁸ Syed Adnan Ali Shah, "Geopolitics of the Caspian Sea Region: A Russia Perspective", *loc. cit.*

mereka.¹¹⁹ Sedangkan, Rakyat di Kaukasus mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan minyak raksasa asal Eropa dan Amerika Serikat (AS) sudi membayar hingga miliaran dolar untuk dapat melakukan pengeksploitasian atas minyak di laut Kaspia dan mendapatkan akses atas pemanfaatan gas alam yang depositnya mencapai miliaran kubik.¹²⁰

Selain faktor ekonomi, hal lain yang juga menjadi akar sebab munculnya gerakan-gerakan separatisme adalah faktor pemerataan kesempatan dalam kehidupan politik. Komposisi personalia di dalam tubuh pemerintah pusat Republik Federasi Rusia didominasi hanya oleh etnis Rusia dan meminggirkan etnis-etnis lainnya.¹²¹ Pada tingkat lokal pun masyarakat di Kaukasus Utara cenderung tidak dapat memilih pemimpin sesuai dengan aspirasi mereka karena pemerintah pusat kerap melakukan intervensi untuk memilih pemimpin lokal yang memang teruji kesetiaannya kepada Kremlin.¹²² Bahkan tidak jarang pemerintah pusat melakukan *dropping*: mengutus dan menetapkan seseorang dari luar wilayah lokal untuk merepresentasikan kekuasaan pemerintah pusat di wilayah-wilayah administratifnya.¹²³

Berdasarkan pada pemaparan di atas, dikarenakan akar sebab timbulnya gerakan separatisme, khususnya di Chechnya dan Dagestan, memiliki dimensi kesejarahan yang sangat panjang, tidak ada solusi instan bagi Pemerintah Rusia untuk menyelesaikan masalah ini. Kasus Chechnya dan Dagestan sekaligus merupakan antitesa dari teori Barry Buzan mengenai "ide tentang negara" sebagai salah satu komponen dalam negara. Tidak terdapat kesamaan identitas, ideologi, dan, terlebih, nasib antara suku-suku di wilayah Chechnya dan Dagestan dengan pemerintah pusat di Rusia. Namun pada sisi lain, eksistensi mereka (gerakan-gerakan separatis) adalah merupakan sebuah ancaman bagi "fisik negara"; integritas wilayah dan keamanan rakyat serta masyarakat Rusia, yang harus ditumpas demi kewibawaan institusi politik (pemerintah) Rusia.

¹¹⁹ Emil Souleimanov, *loc. cit.*

¹²⁰ "Dagestan: Tinju untuk Kremlin", *Suara Pembaruan*, 31 Agustus 1999

¹²¹ *ibid.*

¹²² Emil Souleimanov, *op. cit.*, hlm. 86.

¹²³ Gregory J. Celestan, "Wounded Bear: The Ongoing Russian Military Operation in Chechnya", Foreign Military Studies Office, <http://www.globalsecurity.org/military/library/report/1996/wounded.htm>, (Diakses tanggal 10 Juli 2007 pukul 14.02 WIB).

Gambar III.1.
Peta Chechnya-Dagestan



Sumber: University of Texas Libraries¹²⁴

¹²⁴ "Chechnya-Dagestan Maps", University of Texas Libraries, http://www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth/chechnyadagestan_rel01.jpg. (Diakses pada tanggal 10 Juli 2007 pukul 10 WIB).

A.1.1. Perang Rusia-Chechnya I (1994-1996)

Pada bulan November 1991, satu bulan sebelum bubarnya Uni Soviet, bekas Jenderal Angkatan Udara Uni Soviet, Dzhokhar Dudayev, bersama-sama Kongres Nasional Masyarakat Chechen (*Nationality Congress of Chechen People* -NCChP), mendeklarasikan kemerdekaan bagi rakyat Chechen dan memproklamkan berdirinya Republik Chechnya Ichkeria secara sepihak. Deklarasi tersebut dilakukan setelah sebelumnya mereka berhasil merebut wilayah Chechnya dari kekuasaan pemerintah pusat Uni Soviet.¹²⁵ NCChP kemudian membubarkan parlemen lokal, menggulingkan Doku Zavgayev, pemimpin Republik Otonom Chechen-Ingushetia yang ditunjuk Kremlin, dan kemudian membunuh Vitali Kutsenko, Ketua Partai Komunis Uni Soviet di Grozny.

Pernyataan kemerdekaan ini ditolak oleh para pemimpin Rusia, dan juga tidak pernah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional.¹²⁶ Pemerintah Rusia, kendati menolak pengakuan kemerdekaan Chechnya, tidak melakukan langkah apapun dan membiarkan Dudayev memimpin. Pada tahun 1992, etnis Ingushetia memisahkan diri dari Chechnya dan bergabung dengan Pemerintah Rusia. Dalam kepemimpinan Dudayev, kondisi domestik Chechnya dominan diwarnai oleh *chaos*, ketidakjelasan pelaksanaan hukum yang berakibat pada tingginya tingkat kriminalitas; terutama pembunuhan, penyanderaan, penculikan, perdagangan manusia, serta korupsi besar-besaran di lingkungan pejabat publik. Dari tahun 1991 sampai dengan 1994 sejumlah ±300.000 orang dari etnis non-Chechen, kebanyakan etnis Rusia, mengungsi dari wilayah Chechnya dan, sekitar 50.000 orang lainnya diperkirakan tewas karena dibunuh atau dinyatakan hilang.¹²⁷ Selain itu, di dalam negeri Chechnya sendiri muncul kelompok lain yang menentang kepemimpinan Dudayev. Kelompok itu dipimpin oleh Ruslan Khasbulatov, mantan pemimpin Soviet Tertinggi (*Supreme Soviet*), dan Ruslan Labazanov yang memimpin pasukan oposisi yang di dukung oleh Moskow.

¹²⁵ *ibid.*

¹²⁶ Emil Souleimanov, *op. cit.*, hlm. 102-103.

¹²⁷ *ibid.*

Pada tanggal 26 Mei dan 29 Juli 1994, berturut-turut pasukan separatis Chechen menyandera sejumlah orang, termasuk diantaranya siswa-siswa sekolah, di daerah Mineralny Voldy, salah satu kota di Rusia. Empat orang tewas dalam insiden ini.¹²⁸ Sebagai reaksi atas insiden-insiden tersebut, Boris Yeltsin pada Desember 1994 memutuskan untuk melancarkan serangan ke Grozny, ibukota Chechnya, dengan asumsi awal bahwa tindakan militer ini akan dapat menghancurkan gerakan separatis Chechnya dalam waktu singkat. Tanggal 10 Desember 1994 pasukan Rusia masuk ke kota Grozny, dengan persiapan minim dan hampir tanpa disertai perencanaan yang matang.¹²⁹ Misi utama dari penyerbuan ini adalah untuk menumpas gerakan pembebasan Chechen, menyelamatkan etnis Rusia dan etnis-etnis non-Chechen lainnya yang ada di wilayah Chechnya, serta mengembalikan tatanan konstitusional dan pengaruh pemerintah pusat di wilayah administratif Rusia tersebut.

Kehadiran pasukan Rusia di dalam wilayah Chechnya disambut dengan aksi-aksi perlawanan sporadis kelompok perlawanan Chechen. Pemimpin Chechnya, Dudayev, sengaja tidak mengeluarkan perintah evakuasi menjelang penyerbuan Rusia dengan tujuan agar seluruh rakyat Chechnya dapat terlibat dan bergabung dengan tentara Chechnya untuk menghadapi Rusia. Aksi-aksi perlawanan dalam intensitas tinggi tersebut memang tidak diduga-duga oleh pasukan Rusia yang sejak awalnya memang kurang persiapan. Serangan pertama tentara Rusia diwarnai dengan kekalahan yang memalukan.¹³⁰ Hingga akhir tahun 1994 kota Grozny belum juga dapat direbut oleh pasukan Rusia.

Setelah melalui pertempuran hebat, Grozny akhirnya dapat dikuasai oleh tentara Rusia pada bulan Februari 1995 dan mendesak para gerilyawan Chechen mundur ke daerah-daerah pegunungan di sekitar Ichkeria. Direbutnya Grozny oleh pasukan Rusia tidak menjadikan perlawanan pejuang Chechen mengendur. Mereka melakukan strategi perang gerilya dan melancarkan aksi-aksi teror ke fasilitas publik di Rusia. Aksi teror terbesar terjadi pada bulan Juni 1995 saat dilakukan pendudukan dan penyanderaan atas rumah sakit di Budyonnovsk. Terdapat 1.600 orang di dalam rumah sakit tersebut yang menjadi

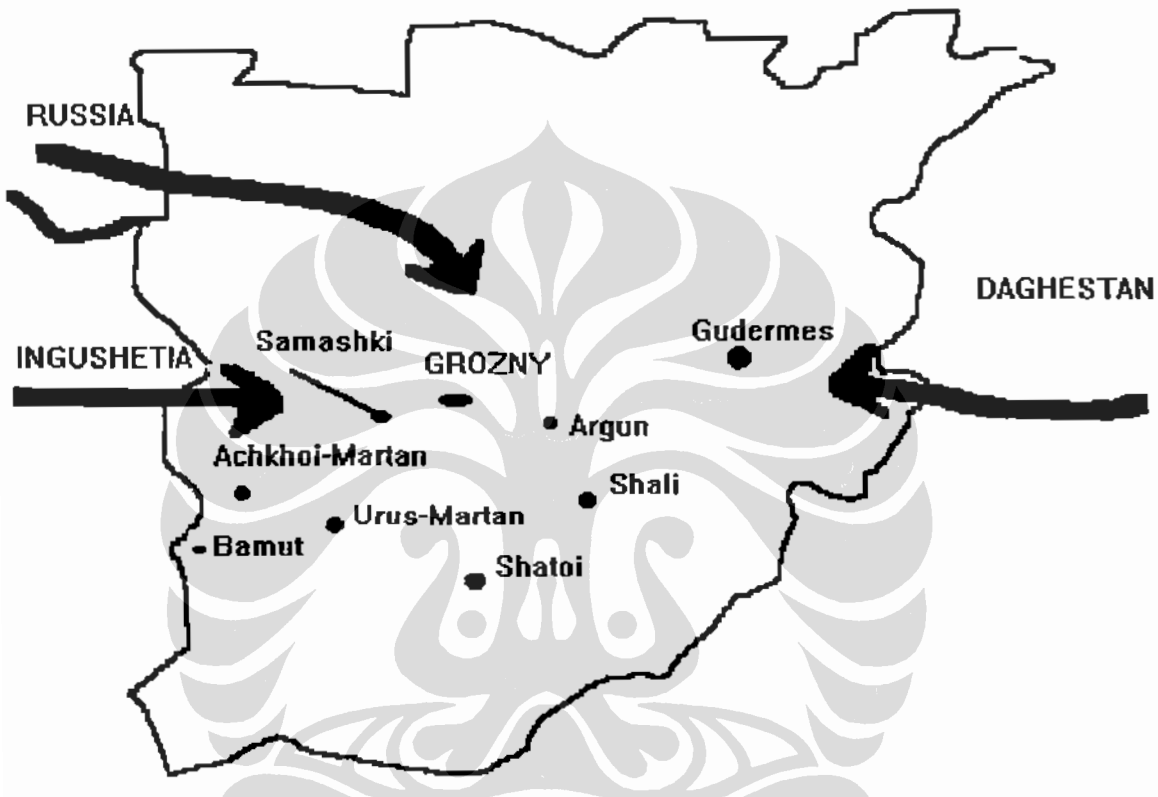
¹²⁸ Gregory J. Celestan, "Wounded Bear: The Ongoing Russian Military Operation in Chechnya", *op. cit.*

¹²⁹ *ibid.*

¹³⁰ *ibid.*

sandera dari gerilyawan Chechen yang dipimpin oleh Shamil Basayev. Insiden tersebut mengakibatkan jatuhnya korban tewas sebesar 129 orang dan 415 orang lainnya mengalami luka-luka.¹³¹

Gambar III.2.
Skema Penyerangan Grozny oleh Pasukan Federasi Rusia



Sumber: GlobalSecurity.org¹³²

Ketidakmampuan pasukan Rusia untuk melumpuhkan pemberontakan di Chechnya dalam tempo waktu singkat sebagaimana dijanjikan oleh pemerintah pada awal diputuskannya serangan membuat Pemerintah Rusia terpojok. Media massa mulai memberitakan berita-berita yang negatif, kelompok-kelompok oposisi mulai bereaksi, dan kecaman demi kecaman datang dari masyarakat Rusia sendiri yang menganggap bahwa pemerintah telah membuang-buang uang pajak mereka padahal Rusia saat itu tengah dilanda pula oleh kesulitan

¹³¹ *ibid.*

¹³² "First Chechnya War: 1994-1996". <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/chechnya1.htm>. (Diakses pada tanggal 10 Juli 2007 pukul 11.20 WIB).

ekonomi. Kondisi tersebut memaksa Pemerintah Rusia untuk memulai dialog dan perundingan dengan pihak separatis Chechnya. 3000 personel pasukan Rusia ditarik mundur dari Grozny dalam proses tersebut. Akan tetapi terjadi miskoordinasi di dalam tubuh militer dan intelijen Rusia saat sepasukan kecil tentara Rusia melakukan serangan di tengah-tengah proses perundingan damai. Pemimpin Chechnya, Dzhokhar Dudayev, tewas pada bulan April 1996 dalam sebuah serangan udara yang dilakukan pasukan Rusia.

Kematian Dudayev mengakibatkan terjadinya demonstrasi besar-besaran di kota Grozny pada bulan Agustus 1996; saat ribuan orang penduduk Chechnya secara serentak mengepung dan menduduki Grozny dan membuat 3.000 personel pasukan Rusia yang disiagakan disana tidak mampu berbuat apa-apa untuk mencegahnya.¹³³ Aksi perebutan kota Grozny itu direncanakan dan kembali dipimpin oleh Jenderal pasukan perang Chechnya, Shamil Basayev. Insiden tersebut memaksa pemerintahan Yeltsin untuk kembali mengadakan perundingan dengan pihak separatis. Perang Rusia-Chechen I secara resmi berakhir dengan ditandatanganinya Perjanjian Khasavyuts pada tanggal 31 Agustus 1996. Berdasarkan perjanjian tersebut, status Chechnya akan diputuskan pada akhir tahun 2001 dan, hingga proses tersebut terlaksana, Republik Chechnya Ichkeria diberikan kemerdekaan secara *de facto*.

Aksi-aksi kekerasan diantara kedua belah pihak tidak berarti mereda pasca ditandatanganinya perjanjian tersebut. Beberapa bulan kemudian komandan kelompok perlawanan Chechen menyatakan diri bertanggungjawab atas aksi peledakan bus di Moskow. Selain itu, Propinsi (*kray*) Stavropol menjadi saksi seringnya terjadi aksi baku tembak antara pihak keamanan Rusia dan pelaku kriminal Chechen di sepanjang wilayah perbatasan. Dalam perang Russia-Chechnya I jumlah korban tewas mencapai ±80.000 sampai 100.000 jiwa dari kedua belah pihak, dimana jumlah korban berdasarkan statistik lebih banyak didominasi oleh penduduk etnis Rusia.¹³⁴

¹³³ *ibid.*

¹³⁴ "Over 200,000 Killed in Chechnya Since 1994", <http://www.mosnews.com/news/2004/11/19/civiliandeath.shtml>, (Diakses pada tanggal 10 November 2007 pukul 00.02 WIB).

A.1.2. Perang Rusia-Chechnya II (1999)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pasca pemberlakuan perjanjian Khasavyurt kondisi keamanan di Rusia tidak kunjung stabil. Pasca penandatanganan perjanjian tersebut, ironisnya, yang justru "stabil" adalah tingkat eskalasi kekerasan yang tidak putus-putus dilakukan oleh kelompok separatis Chechen hampir di seluruh wilayah kedaulatan Pemerintah Republik Federasi Rusia.¹³⁵ Rangkaian aksi kekerasan sebagaimana dimuat di dalam Tabel III.1 dan keterlibatan tokoh pejuang Chechnya, Samil Basayev, dengan sekitar ±2.000 orang pasukan Chechnya pengikutnya, dalam deklarasi kemerdekaan Dagestan pada bulan Agustus 1999, menimbulkan reaksi dari pihak pemerintah pusat di Rusia. Setelah Rusia berhasil memadamkan gerakan separatisme di Dagestan melalui sebuah operasi militer pada medio akhir bulan Agustus 1999, para pemimpin Rusia di Kremlin memutuskan untuk kembali menyerbu Chechnya.

Pada akhir bulan September 1999, pasukan Rusia mulai melakukan serangan ke kota Grozny. Dalam serangan kali ini, untuk tidak lagi mengulangi kesalahan pada tahun 1995, pasukan Rusia banyak menggunakan persenjataan dan artileri berat. Presiden Chechnya, Aslan Maskhadov, menyatakan pemberlakuan kondisi darurat dan menyatakan *gazawat* (perang suci) untuk menghadapi serangan Rusia.

Kota Grozny akhirnya dapat kembali dikuasai oleh pasukan Rusia pada bulan November 1999 setelah sebelumnya dilakukan pengerahan pasukan dan peralatan tempur besar-besaran untuk menggempur pasukan separatis Chechnya. Kendati demikian, sama halnya dengan kondisi dalam perang Rusia-Chechnya I, dikuasainya kota Grozny oleh pasukan Rusia sama sekali tidak membuat perlawanan pasukan Chechnya mengendur. Dengan menggunakan taktik perang gerilya dan sabotase, mereka mampu merepotkan pasukan Rusia.

Pada bulan September 2001 pasukan separatis Chechnya berhasil menembak jatuh helikopter Rusia yang membawa beberapa pejabat militer senior Rusia. Atas insiden tersebut pihak militer Rusia menangkap lebih dari 400 orang etnis Chechen yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Operasi militer Rusia dihentikan pada tahun 2002 setelah mereka dapat menguasai kota

¹³⁵ Emil Souleimanov, *op. cit.*, hlm. 106.

Grozny. Hingga saat ini, kendati operasi militer telah berakhir, masih terus terjadi aksi-aksi teror yang dilakukan kelompok perlawanan Chechnya kepada sarana-sarana umum di Rusia. Salah satu aksi teror yang terbesar terjadi pada tanggal 23-26 Oktober 2002, saat 40 orang pasukan perlawanan Chechnya melakukan penyanderaan terhadap 800 orang di gedung tater di kota Moskow. 117 orang sandera tewas setelah pasukan keamanan Rusia menembakan gas opium ke dalam gedung teater.¹³⁶

Tabel III.1. Tindakan Kekerasan Gerakan Separatis Chechen (1996-1999)¹³⁷

Waktu (Tanggal/Bulan/Tahun)	Lokasi	Bentuk Teror	Jumlah Korban
16 November 1996	Kaspiysk (Dagestan)	Peledakan Apartemen	69 orang tewas
23 April 1997	Arnavir	Peledakan bom di stasiun kereta	3 orang tewas
28 Mei 1997	Pyatigorsk	Peledakan bom di stasiun kereta	2 orang tewas
Desember 1997	Buynaksk (Dagestan)	Serangan terhadap garnisun pasukan Rusia oleh kelompok separatis Chechnya yang dipimpin oleh Emir Khattab	-
19 Maret 1999	Vladikavkaz (Ossetia)	Peledakan bom di pusat perbelanjaan (mal)	64 orang tewas
September 1999	Moskow	Peledakan bom di apartemen	
4 September 1999	Buynaksk (Dagestan)	Peledakan bom berbahan baker hexogen di apartemen	62 orang tewas
16 September 1999	Volgodonsk	Peledakan bom di apartemen	18 orang tewas

¹³⁶ "Diduga, Rusia Pakai Gas Opium", *Kompas*, 30 Oktober 2002.

¹³⁷ Disarikan dari berbagai sumber.

Aksi lain yang kerap dikatakan sebagai aksi teror terbesar yang dilakukan oleh kelompok perlawanan Chechnya terjadi pada awal bulan September 2004, dengan disanderanya ±1.000 orang warga sipil di sekolah Beslan I. Akibat penyanderaan tersebut, 331 orang sandera, 11 orang pasukan keamanan Rusia, dan seluruh pelaku teror yang berjumlah 31 orang, tewas setelah pasukan keamanan Rusia melakukan penyerbuan ke dalam sekolah.¹³⁸

A.2. Kepentingan Nasional dalam Sektor Energi

Implementasi atas kepentingan nasional Rusia hanya dimungkinkan apabila dilandasi oleh pembangunan perekonomian yang stabil. Hal tersebut menjadikan kepentingan nasional Rusia di dalam sektor ini (ekonomi) sebagai hal yang utama untuk menunjang suksesnya pencapaian kepentingan nasional Rusia di dalam sektor-sektor lainnya. Oleh sebab itu, Pemerintah Rusia menjadikan masalah keamanan nasional dan perlindungan atas kepentingan Rusia dalam sektor ekonomi sebagai prioritas dasar dari seluruh kebijakan negara.¹³⁹

Eksistensi gerakan-gerakan etno-religius di dalam wilayah kedaulatan Rusia, selain mengancam integritas wilayah dan keamanan rakyat serta masyarakat Rusia, juga berpotensi mengancam pencapaian kepentingan negara tersebut dalam sektor ekonomi. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, wilayah Kaukasus bagian Utara, termasuk Chechnya dan Dagestan, adalah wilayah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bagi Rusia. Wilayah tersebut dilewati oleh saluran pipa strategis yang mengalirkan minyak mentah dari pantai-pantai Laut Kaspia hingga laut hitam (**lihat gambar III.3**). Selain itu, wilayah Kaukasus bagian Utara juga dikenal kaya akan gas alam dan mineral hasil tambang lainnya. Dalam era Uni Soviet, Rusia adalah merupakan produsen minyak yang terbesar di dunia dengan total produksi sebesar 12 juta barel per hari.¹⁴⁰ Dengan kondisi bahwa sumber minyak terbesar mereka kala itu, Siberia, telah tidak lagi dapat memproduksi secara maksimal, maka sumber minyak di Laut Kaspia adalah merupakan sumber minyak lainnya yang harus dipertahankan oleh Rusia.

¹³⁸ Emil Souleimanov, *loc. cit.*

¹³⁹ "National Security Concept of the Russian Federation", *op. cit.*

¹⁴⁰ Edward C. Chow, "Russian Pipelines: Back to the Future?", <http://www.carnegieendowment.org/publications/index.cfm?fa=view&id=1438&prog=zru>, (Diakses pada tanggal 10 Desember 2006 pukul 01.20 WIB).

Laut Kaspia atau Laut Mazandaran merupakan laut yang, secara geografis, terkurung oleh daratan antara benua Asia dan Eropa. Luas dari Laut Kaspia adalah sebesar 371.000 km² dan dikelilingi oleh lima negara, yaitu Iran, Azerbaijan, Rusia, Kazakhstan, dan Turkmenistan. Sejumlah negara merasa memiliki kepentingan untuk menguasai Laut Kaspia dikarenakan kekayaan sumber daya minyak yang teramat besar, dengan jumlah bervariasi antara 253-270 *billion barrels* (bbl) dan 328 *trillion cubic feet* (tcf) gas alam.¹⁴¹ Rusia, melalui perusahaan gas milik negara, Gazprom, adalah merupakan salah satu eksploitor utama sumber minyak dan gas alam di wilayah ini.¹⁴² Eksploitasi Rusia atas sumber minyak dan gas alam di wilayah ini dilakukan melalui pembangunan pipa-pipa penyalur kedua sumber alam ini. Pipa-pipa penyalur minyak dan gas alam ke Rusia antara lain adalah¹⁴³ pipa minyak Aytrau (Kazakhstan)-Samara (Rusia), Baku (Azerbaijan)-Novorosiisk (Rusia), dan pipa minyak dari *Caspian Pipeline Consortium* (CPC) yang membawa minyak dari Kazakh (Kazakhstan) ke Novorosiisk. Sedangkan, pipa gas utama bagi kepentingan ekonomi Rusia adalah pipa gas antara negara-negara Asia Tengah-Rusia-Eropa.¹⁴⁴

Gerakan separatis di wilayah Chechnya dan lalu Dagestan selain memiliki implikasi politik dan keamanan, juga mempunyai pengaruh terhadap kepentingan nasional Rusia dalam sektor ekonomi. Rusia tentu saja tidak menginginkan pipa-pipa minyak dan gas alamnya dikuasai dan dikontrol oleh kelompok-kelompok gerakan separatis di Chechnya dan Dagestan yang, secara geografis, memiliki akses langsung atas sumber minyak dan gas alam di Laut Kaspia. Selain itu, Rusia juga berkepentingan untuk menjaga reputasinya di hadapan kolega-kolega asingnya dengan menghadirkan iklim keamanan yang kondusif bagi upaya eksplorasi sumber-sumber minyak.¹⁴⁵

¹⁴¹ Syed Adnan Ali Shah, "Geopolitics of the Caspian Sea Region: A Russia Perspective", *op. cit.*, hlm. 77

¹⁴² Edward C. Chow, *op. cit.*

¹⁴³ Syed Adnan Ali Shah, "Geopolitics of the Caspian Sea Region: A Russia Perspective", *loc. cit.*

¹⁴⁴ *ibid.*

¹⁴⁵ Sergei Blagov, "Petrodollars Behind the Chechen Tragedy", <http://www.globalpolicy.org/security/natres/oil/centralasia/1999/1207groz.htm>. (Diakses pada tanggal 30 April 2007 pukul 00.20 WIB).

Gambar III.3.
Lokasi Chechnya-Dagestan-Laut Kaspia



Sumber: GlobalSecurity.org¹⁴⁶

A.3. Atribut Nasional dan Ambisi Global Rusia

Republik Federasi Rusia (*Rossiyskaya Federatsiya*), atau Rusia (*Rossiya*) adalah negara dengan luas wilayah terbesar di dunia dengan luas areal sebesar 17.075.200 km².¹⁴⁷ Wilayah geografis Rusia membentang di sebelah timur benua

¹⁴⁶ "First Chechnya War: 1994-1996", *op. cit.*

¹⁴⁷ "The World Factbook: Russia", *op. cit.*

Eropa dan utara benua Asia dengan pegunungan Ural sebagai batas antara dua benua. Negara ini adalah merupakan negara yang berbentuk republik federasi yang memiliki 89 daerah administratif federal yang terdiri atas 55 propinsi (49 *oblast* dan enam *kray* atau propinsi di perbatasan), 10 *okrug* (distrik otonom), 1 propinsi otonom, 21 republik, dan dua kota federal.¹⁴⁸ Posisi geografis unik yang dimiliki Rusia dimana sebagian wilayah berada di sebelah utara Asia dan sebagian wilayah lainnya berada di Eropa, menyebabkan negara ini mempunyai identitas ganda: identitas sebagai bangsa Eropa dan sekaligus juga bangsa Asia, bangsa Eurasia.¹⁴⁹ Pembentukan jati diri bangsa Rusia adalah masalah yang terkait erat dengan perjalanan kesejarahan negara tersebut semenjak era pra-revolusi 1917.

Pada periode Pra-Bolshevik, selama berabad-abad bangsa Rusia hidup di dalam sebuah sistem pemerintahan feodalistik dimana kelas bangsawan menjadi kelas yang paling berkuasa. Untuk dapat memahami budaya feodalistik Rusia, terlebih dahulu kita harus memahami pilar-pilar yang menopang sistem kekaisaran Rusia. S. Uvarov, Menteri Pendidikan Rusia pada abad-XIX, pernah memunculkan suatu formula yang kemudian dijadikan sandaran resmi bagi pemerintahan Tsarisme Rusia. Ide "Kerakyatan Resmi" Usarov tertuang dalam tiga semboyan: "*Samoderzhavie* (otokrasi), *Pravoslavie* (ortodoksi) dan *Narodnost* (kerakyatan)".¹⁵⁰ Sebagaimana ditkemukakan oleh A. Fachrurodji, tiga semboyan tersebut terlepas dari sifat sloganistiknya, memiliki posisi sentral dalam sistem budaya Rusia. Otokrasi (Tsar) dan Ortodoksi (agama) merupakan elemen penting yang saling bersinergi dalam membentuk dan mengatur sistem masyarakat Rusia. Tsar di satu sisi diberi legitimasi ketuhanan sebagai wakil Tuhan di dunia, yang dengan demikian memiliki kekuasaan dan wewenang mutlak untuk memimpin negara. Sementara, ortodoksi atau kalangan gereja mendapatkan berbagai otoritas, *privilege*, dan kemandirian untuk mengatur urusan gereja. Hubungan antara gereja dengan pemerintah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk hubungan simbiosis mutualistik.¹⁵¹

¹⁴⁸ *ibid.*

¹⁴⁹ Vladimir Putin, "Prospek Baru Rusia tentang Asia", *op. cit.*

¹⁵⁰ A. Fachrurodji, *Rusia Baru Menuju Demokrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 17.

¹⁵¹ *ibid.*, hlm. 18.

Sistem otokrasi Rusia (*Samoderzhavie*) adalah merupakan hasil dari evolusi, sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan peradaban manusia. Terdapat tiga tahapan/periode dalam sistem feodal Rusia. Tahapan pertama adalah masa yang dikenal sebagai periode Kepangeranan (*Knyazhestvo*), dimana dalam periode ini masyarakat Rusia dipimpin oleh seorang Pangeran (*Knyaz*). Masa ini berlangsung sejak dikenalnya sistem pemerintahan di Rusia hingga berkuasanya Ivan IV yang memperkenalkan istilah Tsar sebagai simbol kekuasaan di seluruh tanah Rus. Istilah "Tsar" sendiri diadopsi dari kata Kaisar (*Cesar*), yang adalah merupakan penggabungan simbol kekuasaan Kaisar (Barat) dan Khan (Timur). Periode terakhir adalah masa imperium yang dipimpin oleh seorang Imperator. Periode ini diawali dan diperkenalkan pada masa pemerintahan Peter Agung, sebagai bagian dari program Westernisasi dan 'emansipasi' bangsa Rusia untuk menyejajarkan diri sederajat dengan bangsa-bangsa Barat.

Periode kepemimpinan Pëtr Agung (1682-1725) adalah salah satu masa terpenting di dalam perjalanan sejarah Bangsa Rusia. Dalam masa ini bangsa Rusia melakukan modernisasi dengan mengadopsi nilai-nilai yang dianggap positif dalam peradaban barat (Eropa) ke dalam setiap lini kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan di Rusia. Modernisasi yang dilakukan oleh Petr Agung ini pada akhirnya secara perlahan mengenyahkan nilai-nilai dan identitas nasional bangsa Rusia yang sebelumnya memiliki akar kuat kepada tradisi Byzantium dan bangsa Slavik. Kondisi tersebut membagi masyarakat di Rusia ke dalam dua kelompok berbeda pemikiran yang hingga dewasa ini pola pikirnya masih tetap eksis di dalam masyarakat Rusia kontemporer: kelompok *Slavophil/Russophil* (berorientasi pada budaya Slavia dan Rusia) dan kelompok *Zapadnik/Westernizer* (berorientasi pada budaya dan nilai-nilai bangsa barat). Dengan demikian, sejarah Rusia secara khas ditandai oleh ambivalensi, yaitu antara isolasi atau ketergantungan kepada Barat, antara rasa kebanggaan nasional dengan keinginan untuk menyejajarkan diri setara dengan bangsa-bangsa barat.

Periode Feodal di dalam sejarah Rusia berakhir di dalam masa kepemimpinan Imperator Nikolai II (1894-1917), Tsar terakhir dari dinasti Romanov, dinasti yang dalam tiga abad sebelumnya berkuasa di Rusia (1617-

1917. Nikolai II secara resmi mundur dari tahta kekaisaran Rusia pada tanggal 2 Maret 1917 sebagai akibat dari Revolusi Februari 1917.

Dalam sejarah Rusia, periode Uni Soviet merupakan periode singkat (hanya berlangsung selama tujuh dasawarsa), namun menempati posisi yang penting di dalam perjalanan sejarah bangsa Rusia. Dalam periode ini, latar belakang ideologi religi yang sebelumnya mendasari kebijakan Rusia dihapus, dan peran tersebut dalam hal tertentu digantikan oleh ideologi komunisme. Pada sisi lain, absolutisme penguasa pada periode ini menunjukkan pengulangan historis seperti apa yang telah dilakukan oleh Tsar-Tsar di dalam periode terdahulu seperti dilakukannya kembali metode teror sebagai alat penguasa dan kemudian disempurnakan pada masa Stalin dengan Stalinisme-nya.¹⁵²

Komunisme sebagai ideologi Uni Soviet tumbuh tak hanya dari ide-ide Karl Marx belaka, tapi lebih jauh ia adalah merupakan hasil dari proses "Rusifikasi" atas ajaran-ajaran Filsuf Jerman tersebut. Gerakan Marxis muncul dalam tradisi pemikiran Rusia yang sudah berkembang pada abad-abad sebelumnya. Gerakan ini memiliki akarnya di dalam diskusi-diskusi kelompok intelegensia yang semakin lama bergulir menjadi aksi-aksi konkret untuk menggulingkan kekuasaan Tsar.

Posisi geografis yang strategis dan kebesaran serta kekayaan sejarah adalah merupakan bagian dari atribut nasional Rusia sebagai sebuah bangsa. Berdasarkan pada hal-hal tersebut, Rusia kemudian mendeskripsikan diri dan peranannya di dalam arena politik internasional. Berdasarkan hal-hal tersebut pula Rusia kemudian menetapkan nilai-nilai yang dianutnya, baik sebagai entitas politik pada level domestik maupun dalam hubungan antar-bangsa.

Tiga pilar/doktrin utama dalam politik luar negeri Rusia adalah, pertama, Rusia sebagai negara nuklir yang setara dengan AS dan negara-negara besar lainnya di dunia; kedua, memainkan peranan yang dominan di negara-negara bekas Uni Soviet; dan ketiga, menjadi peserta aktif yang berpengaruh dalam masalah-masalah internasional.¹⁵³ Ketiga pilar tersebut hanya dapat dimunculkan dan kemudian diwujudkan oleh Rusia jika negara ini memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai. Salah satunya adalah dalam hal kepemilikan teknologi dan persenjataan (militer). Ada dua hal yang menjadi prioritas dalam

¹⁵² *ibid.*, hlm. 111.

¹⁵³ *ibid.*

pembangunan militer Rusia.. Pertama, Angkatan Bersenjata (AB) Rusia ditujukan guna mencegah semua agresor yang berniat menyerang tanah Rusia. Langkah yang diambil pemerintah Rusia dalam hal ini adalah membina dan mendayagunakan kekuatan nuklir strategisnya untuk melakukan *first strike* sebelum negara itu diserang musuh. Prioritas kedua, adalah menindak segala bentuk agresi lokal yang datang dari dalam negeri dengan tujuan mengacaukan stabilitas negara. Cara yang diambil untuk hal ini adalah meningkatkan kesiapan tempur (*combat readiness*) dari semua unsur angkatan perang Rusia.¹⁵⁴ Ini berarti, pemerintah Rusia tidak akan mengambil jalan kompromi bagi segala bentuk ancaman yang bisa meruntuhkan negara Rusia.

B. Faktor Eksternal

B.1. Kepentingan Rusia di Kawasan Asia Tengah

B.1.1. Kompleksitas Keamanan di Kawasan Asia Tengah

Pasca tahun 1991, negara-negara di kawasan Asia Tengah secara tidak diduga-duga, bahkan oleh sebagian dari mereka sendiri, meraih kemerdekaan nasionalnya setelah setelah selama sekian dekade berada di bawah kekuasaan Uni Soviet.¹⁵⁵ Kemerdekaan yang tiba-tiba ini menghantarkan negara-negara di kawasan Asia Tengah kepada masa transisi yang tidak mudah: instabilitas ekonomi, maraknya aksi-aksi terorisme, dan sistem politik yang represif.¹⁵⁶ Berada sekian lama di bawah kekuasaan Moskow, beberapa abad lamanya di bawah kekuasaan kekaisaran Rusia dan lalu Uni Soviet, membuat negara-negara ini seperti kehilangan identitasnya, baik identitas Asia dan identitasnya sebagai negara Muslim.¹⁵⁷ Kyrgistan, sebagai salah satu negara yang mendapat "kemerdekaan kejutan"¹⁵⁸ pada tahun 1991, melalui Presidennya kala itu, Azkar Akayev, menyatakan bahwa mereka "tidak bahagia" dengan datangnya

¹⁵⁴ Alexei G. Arbatov, *The Russian Military In The 21st Century*, monograph presented at the U.S. Army War College's Annual Strategy Conference, April 22-24, 1997.

¹⁵⁵ Sean L. Yom, "Geopolitics in Central Asia: SCO and its Future", <http://www.cac.org/dataeng/esenov-anti-terror-campaign-IISS.shtml>. (Diakses pada tanggal 8 September 2007, pukul 17.41 WIB).

¹⁵⁶ *ibid.*

¹⁵⁷ Sergey Gretzky, "Russia's Policy Toward Central Asia", *op. cit.*

¹⁵⁸ Istilah "kemerdekaan kejutan" (*surprised independence*) lazim digunakan untuk menyebut kemerdekaan yang secara tiba-tiba didapatkan oleh negara-negara di Asia Tengah dengan tubarnya Uni Soviet pada tahun 1991. *Ibid.*

kemerdekaan tersebut.¹⁵⁹ Akayev mengemukakan kekhawatiran Kyrgistan bahwa kemerdekaan yang didapatkan oleh negaranya adalah prematur dan hanya akan menempatkan mereka dalam situasi konflik internasional yang sebelumnya tidak pernah mereka hadapi.

Negara-negara Asia Tengah kemudian harus menghadapi kenyataan bahwa mereka berada secara bersama di sebuah kawasan yang sebenarnya sangat strategis dan mengandung sumber daya alam yang potensial namun juga menghadirkan sejumlah permasalahan keamanan yang kompleks. Dikatakan sebagai kawasan yang strategis oleh karena Asia Tengah merupakan jantung dunia berdasarkan teori McKinder karena menghubungkan dua benua yaitu Asia dan Eropa. Kawasan Asia Tengah juga pernah menjadi jalur merkantilisme yang dikenal sebagai Jalur Sutra atau *Silk Route* dan wilayah penyangga antara Rusia dan Inggris pada abad ke 19 atau sebelum Perang Dunia kedua. Kemudian kawasan Asia Tengah juga menyimpan sumber daya alam yang sangat potensial yaitu minyak mentah dan gas alam di Laut Kaspia.

Namun di samping posisi yang strategis dan kandungan kekayaan alam, perkembangan kawasan Asia Tengah paska kemerdekaan atau sejak awal dekade 90-an juga tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah dan masalah kultural. Latar belakang sejarah berkenaan dengan pembagian wilayah yang dilakukan oleh Pemerintah Uni Soviet ketika negara adidaya tersebut menguasai wilayah Asia Tengah pada tahun 1924 dan membagi wilayah tersebut menjadi lima negara bagian. Termasuk sebuah wilayah otonomi di kawasan Gorno-Badakhstan. Hasil pembagian wilayah oleh Pemerintah Stalin kemudian menjadi pedoman kepemilikan wilayah setelah lima negara Asia Tengah kemudian merdeka.

Namun dalam perkembangannya, atas dasar kepentingan politik dan ekonomi maka mulai timbul permasalahan di wilayah perbatasan seperti perebutan wilayah *Fergana Valley* antara Uzbekistan, Tajikistan dan Kyrgyzstan. Wilayah tersebut memang merupakan wilayah perpotongan ketiga negara tersebut dan merupakan lembah yang subur karena dialiri sungai besar yang potensial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun karena proses

¹⁵⁹ *ibid.*

pengelolaan sungai di wilayah tersebut terutama untuk pembangkit tenaga Listrik sebelumnya dikelola oleh pemerintah Uni Soviet, maka ketika ketiga negara tersebut merdeka, maka mereka tidak memiliki dana yang mencukupi untuk melanjutkan proyek pembangkit tenaga listrik yang memang dibangun di wilayah Kyrgyzstan.

Untuk menutupi kebutuhan dana, maka Kyrgyzstan meminta kontribusi dana pengelolaan dari Uzbekistan dan Tajikistan karena kedua negara tersebut juga berkepentingan terhadap sumber daya sungai di *Fergana Valley*. Sempat terjadi konflik di antara ketiga negara tersebut walaupun tidak sampai pada konflik militer. Namun akhirnya atas dasar semangat regionalisme maka ketiganya justru membentuk kerjasama pengelolaan bersama terhadap wilayah *Fergana Valley*.¹⁶⁰

Pola permusuhan lain juga tercermin dari munculnya konflik antara Uzbekistan dan Tajikistan ketika terjadi perang sipil di Tajikistan. Konflik tersebut sebenarnya dimulai dengan kebijakan dukungan yang dilakukan Presiden Karimov kepada pemerintah Tajikistan untuk melakukan tekanan terhadap kelompok pemberontak Islam pada tahun 1992. Kebijakan tersebut dikarenakan Karimov juga melakukan kebijakan serupa di Uzbekistan. Wilayah Tajikistan dan Uzbekistan secara historis memang adalah merupakan pusat pertumbuhan agama Islam terutama, di kawasan Samarkand dan Bukhara.¹⁶¹

Dalam perkembangannya kedua wilayah tersebut kemudian masuk dalam kawasan *Fergana Valley* yang telah menjadi pusat pergerakan kelompok *Basmachi* (pemurnian Islam) dalam melakukan pertawanan terhadap kekuasaan Uni Soviet. Di kawasan tersebut studi Islam juga bertumbuh secara pesat sehingga semakin memperkuat gerakan fundamentalis Muslim untuk melakukan tekanan terhadap Pemerintah Uzbekistan dan Tajikistan agar kedua negara tersebut dapat menjadi negara Islam yang menerapkan syariah.

Pemerintah Islam Karimov kemudian kecewa terhadap pemerintah Tajikistan setelah Pemerintah Tajikistan pada tahun 1996 memutuskan untuk melakukan perundingan damai dengan kelompok fundamentalis Muslim dan

¹⁶⁰ Marlène Laruelle, "Russia's Central Asia Policy and the Role of Russian Nationalism", *Silk Road Paper* April 2008, (Washington DC: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program, 2008), hlm. 41-42.

¹⁶¹ *ibid.*, hal. 49.

kelompok oposisi lainnya dan kemudian justru membentuk pemerintahan koalisi. Kebijakan pemerintah Tajikistan dianggap Karimov justru dapat membahayakan posisi Pemerintah Uzbekistan karena menganggap nilai-nilai Islam adalah sebuah pencerahan sehingga akan semakin memicu kebangkitan gerakan fundamentalis Muslim di Uzbekistan. Dalam upaya menanggapi tindakan Pemerintah Tajikistan tersebut, Karimov kemudian mendorong etnis Uzbek yang berjumlah 24% dari seluruh penduduk Tajik dan tinggal di utara Tajikistan untuk melakukan pemberontakan.¹⁶²

Pada bulan Mei 1992,¹⁶³ bertempat di Tashkent, Uzbekistan, negara-negara di kawasan Asia Tengah (Kazakhstan, Kyrgistan, dan Uzbekistan) menandatangani perjanjian untuk membentuk sistem keamanan bersama (*Treaty on Collective Security*) bersama Armenia dan Rusia. Perjanjian ini, sebagaimana banyak disebutkan oleh banyak kalangan, merupakan salah satu momentum utama bagi kembalinya kekuasaan Rusia di kawasan Asia Tengah. Negara-negara di Asia Tengah bukan tidak menyadari hal tersebut, akan tetapi mereka merasa mendapatkan ancaman yang lebih serius di dalam negerinya apabila dibandingkan dengan hegemoni Rusia. Ancaman dimaksud adalah keberadaan gerakan-gerakan ekstrimisme agama, terutama gerakan radikalisme Islam, yang mulai marak di kawasan tersebut.¹⁶⁴

Gerakan muslim radikal, sebagaimana di Rusia, adalah juga bukan merupakan hal baru bagi negara-negara di kawasan Asia Tengah. Semenjak era kekuasaan Uni Soviet, gerakan-gerakan ini telah bermunculan menentang kekuasaan rezim komunis yang menindas eksistensi kaum Muslim di kawasan yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Kaum Islam Wahabi, Basmachi, dan komunitas "pemurnian Islam" (Jadid) di Uzbekistan dan Tajikistan, misalnya, telah semenjak lama merongrong kekuasaan pemerintah masing-masing negaranya.¹⁶⁵ Pasca runtuhnya Uni Soviet, eksistensi dari gerakan-gerakan muslim militan ini tidak serta merta hilang. Gerakan Hizbut

¹⁶² *ibid.*

¹⁶³ Borys Parakhonsky, "Central Asia: Geostrategic Survey", *op. cit.*

¹⁶⁴ *ibid.*

¹⁶⁵ Alekshei Malashenko, "Islam and Politics in Central Asian States", *op. cit.*

Tahrir di Tajikistan misalnya, hampir memenangkan pemilu di negara itu jika saja tidak ada intervensi dari pemerintah Tajikistan dengan bantuan Rusia.¹⁶⁶

Di Uzbekistan, gerakan radikal *Islamic Movement of Uzbekistan* (IMU) yang di pimpin oleh Juma Namangani muncul sejak akhir tahun 1997 untuk melawan pemerintahan Presiden Islam Karimov. Sebelumnya, pemerintah Uzbekistan telah pula diresahkan oleh kehadiran banyak pendakwah-pendakwah keagamaan asal Arab Saudi dan Pakistan yang kerap mendakwahkan Islam yang, menurut Pemerintah Uzbekistan, "konservatif dan meyuburkan tindakan-tindakan yang sarat akan hal-hal kekerasan."¹⁶⁷ Kekhawatiran Pemerintah Uzbekistan bertambah setelah munculnya gerakan Taliban dalam peta perpolitikan Afghanistan pada medio akhir tahun 1990-an. Potensi terhadap munculnya gerakan-gerakan serupa di wilayahnya masing-masing juga membuat khawatir negara-negara lain di kawasan tersebut, seperti Tajikistan dan Kyrgistan.¹⁶⁸

Kehadiran gerakan-gerakan ekstrimisme agama di kawasan ini berkaitan erat dengan kultur dan latar belakang sejarah Asia Tengah yang memang didominasi dengan perkembangan agama Islam terutama setelah dikuasai oleh bangsa Turki pada abad pertengahan. Gerakan ini kemudian semakin meningkat setelah aneksasi Kerajaan Rusia pada pertengahan dekade 18 ke kawasan ini. Gerakan yang pertama kali muncul adalah kelompok Basmachi. Gerakan Basmachi semakin kuat ketika Wilayah Asia Tengah dikuasai kelompok Bolshevik Rusia setelah revolusi 1917 yang kemudian membentuk negara Uni Soviet pada tahun 1923. Dengan diberlakukannya indoktrinasi ideologi komunisme di kawasan Asia Tengah, terjadi tindakan represif terhadap kekuatan Muslim. Karena itulah sepanjang masa pendudukan Uni Soviet muncul perlawanan gerakan fundamentalis Muslim terutama di wilayah *Fergana Valley* yang dianggap sebagai basis dari gerakan tersebut. Ketika negara-negara Asia Tengah merdeka, gerakan fundamentalis Muslim berharap bahwa Asia Tengah dapat menerapkan hukum Islam (*sharia*) dan menjadi negara Islam berdasarkan religi mayoritas dan kultur masyarakat di Asia Tengah.

¹⁶⁶ Sergey Gretskey, "Russia's Policy Toward Central Asia", *op. cit.*

¹⁶⁷ "Kegigihan Kaum Uzbek Mempertahankan Islam", *op. cit.*

¹⁶⁸ Alekshei Malashenko, "Islam and Politics in Central Asian States", *op. cit.*

Kebangkitan gerakan fundamentalis Muslim di wilayah Asia Tengah pada masa pasca kemerdekaan juga banyak dipengaruhi dengan munculnya Gerakan solidaritas Muslim Mujahidin yang melakukan perjuangan melawan aneksasi Uni Soviet di Afghanistan pada tahun 1980-1989. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika gerakan Mujahidin tersebut kemudian pecah dan menimbulkan perang saudara di Afghanistan pasca penarikan mundur pasukan Uni Soviet. Perang saudara tersebut kemudian melahirkan kelompok Mujahidin yang moderat atau yang kemudian dikenal sebagai Aliansi Utara dan kelompok Taliban yang berupaya menerapkan hukum Islam secara ketat.

Sebenarnya sebelum pasukan Uni Soviet ditarik mundur dari Afghanistan, pemerintah Uni Soviet dan Pemimpin Partai Komunis Uzbekistan berupaya untuk mempengaruhi etnis Uzbek yang ada di Afghanistan untuk melakukan pengendalian terhadap wilayah Utara Afghanistan dengan membentuk pemerintahan sekuler. Kebijakan tersebut cukup berhasil terutama setelah salah satu Jenderal Mujahidin, Rashid Dostum, yang berasal dari etnis Uzbek berhasil menguasai enam propinsi dan dengan bantuan militer dari Pemimpin Partai Komunis Uzbekistan dan pemerintah Uni Soviet berhasil mengantisipasi konflik antara kelompok Mujahidin dan Taliban di wilayah tersebut. Setelah Uzbekistan dan negara-negara Asia Tengah lainnya merdeka, Islam Karimov berupaya untuk mendorong terbentuknya aliansi anti Taliban yang merupakan kerjasama antara negara-negara Asia Tengah dengan Rusia. Namun, kebijakan tersebut tidak dapat dilanjutkan setelah Jenderal Dostum gagal mempertahankan wilayah Mazār-e Sharīf di wilayah utara Afghanistan yang pada 1998 jatuh ke tangan kelompok Taliban. Pemerintah Uzbekistan akhirnya harus menerima kondisi bahwa negaranya akan bertetangga dengan Afghanistan yang telah diuasai oleh kelompok fundamentalis Muslim Taliban.

Kondisi inilah yang menyebabkan negara-negara Asia Tengah kemudian dihadapkan pada tantangan baru yaitu semakin meluasnya pengaruh gerakan fundamentalis Muslim dari Afghanistan ke wilayah Asia Tengah. Fenomena tersebut lebih diperumit ketika Pemerintah Taliban melakukan kebijakan perlindungan terhadap Osama Bin Laden yang oleh pihak AS dianggap sebagai tokoh dibalik serangan kepada sejumlah fasilitas Amerika Serikat yang mencapai puncaknya pada tragedi 9/11, bersama dengan jaringan terorisme internasional Al-

Qaeda. Disinyalir bahwa Al-Qaeda telah dapat memperluas jaringannya kepada kelompok fundamentalis Muslim yang ada di hampir seluruh kawasan termasuk Asia Tengah.¹⁶⁹

Salah satu kelompok Muslim fundamentalis yang cukup berperan di Asia Tengah, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya adalah IMU. Kemunculan IMU banyak dipengaruhi dengan bangkitnya gerakan Wahabi yang memiliki target untuk memperluas upaya penerapan hukum Islam, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pengaruh aliran Wahabi diperoleh oleh masyarakat Uzbekistan yang terlibat di dalam IMU terutama ketika mereka belajar di Saudi Arabia dan Pakistan. Sebagian besar dari mereka adalah merupakan bekas eksponen gerakan solidaritas Pejuang Muslim Mujahiddin dalam Perang Afghanistan melawan Uni Soviet pada tahun 1979-1989.

Munculnya ancaman dari kelompok-kelompok ekstrimisme agama kemudian juga dikaitkan dengan ancaman yang bersifat non-konvensional lainnya seperti lalu lintas perdagangan senjata gelap serta perdagangan obat-obatan terlarang. Keterkaitan tersebut disebabkan karena sumber dari perluasan gerakan fundamentalisme Muslim, kelompok Taliban di Afghanistan, memang dikenal sebagai produsen opium terbesar di dunia. Lebih dari 85% opium dunia berasal dari Afghanistan yang kemudian secara gelap dipasarkan melalui wilayah Asia Tengah masuk ke Rusia dan Eropa. Bahkan pada masa perang sipil di Afghanistan, opium digunakan untuk membiayai kebutuhan perang termasuk kebutuhan ekonomi masyarakat Afghanistan.

Ketika pemerintah Taliban berkuasa, sempat diberlakukan pelarangan penanaman daun opium (*opium poppy*) sebagai bahan dasar opium atau heroin. Namun karena Pemerintah Taliban mengalami kesulitan dalam membangun ekonomi masyarakat Afghanistan, pada akhirnya mereka memperbolehkan masyarakatnya menanam kembali daun opium dan melakukan transaksi ilegal peredaran opium. Wilayah Asia Tengah, khususnya *Fergana Valley*, merupakan pusat dari perdagangan opium yang dibawa dari Afghanistan yang kemudian

¹⁶⁹ Alexander Nikitin, "The End of the 'Post-Soviet Space' The Changing Geopolitical Orientations of the Newly Independent States", *Russia And Eurasia Briefing Paper* February 2007, (London; Chatham House (The Royal Institute of International Affairs), 2007), htm. 8.

selanjutnya dipasarkan di Rusia dan wilayah Eropa. Perdagangan opium tersebut juga menjadi sumber dana bagi gerakan-gerakan Muslim fundamentalis untuk membeli persenjataan dan kebutuhan lainnya secara ilegal. Pemerintah Uzbekistan dan Tajikistan mengalami kesulitan dalam menangani perdagangan opium tersebut karena wilayah *Fergana Valley* masih dikuasai oleh *warlords* yang memiliki kekuatan bersenjata sehingga tidak mudah untuk ditaklukkan pemerintah.

B.1.2. Ancaman bagi Kepentingan Rusia

Selain menghadapi gerakan-gerakan etno-religi yang berasal dari dalam wilayah administratifnya di Chechnya dan Dagestan, pemerintah Rusia juga dirisaukan oleh bangkitnya kekuatan-kekuatan gerakan Islam militan di negara-negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah.¹⁷⁰ Kecemasan Rusia atas bangkitnya gerakan-gerakan tersebut di Asia Tengah adalah sangat beralasan. Dengan kedekatan faktor geografis dan kesamaan keyakinan, kemungkinan bagi dilakukannya ekspor, baik yang sifatnya materil dan atau non-materil dari gerakan-gerakan fundamentalis di Asia Tengah kepada gerakan-gerakan separatis-etno-religius di Rusia sangat besar.¹⁷¹ Minimal, keberadaan gerakan-gerakan Muslim radikal Asia Tengah akan dapat mengilhami dan menyemangati perlawanan yang dilakukan kelompok-kelompok separatis-etno-religius di Rusia.¹⁷²

Kemunculan gerakan-gerakan Islam militan di kawasan ini, seberapa pun besarnya, adalah hal yang tidak konstruktif bagi kepentingan politik dan keamanan Rusia, khususnya apabila menyangkut aksi-aksi perlawanan kelompok separatisme di wilayah administratif Rusia. Terorisme¹⁷³ merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional Republik Federasi Rusia. Jaringan terorisme internasional telah melakukan kampanye-kampanye terbuka untuk menghadirkan instabilitas dalam situasi domestik Rusia.¹⁷⁴ Atas dasar itu, Rusia

¹⁷⁰ Sergey Gretsky, "Russia's Policy Toward Central Asia", *op. cit.*

¹⁷¹ *ibid.*

¹⁷² Alekshei Malashenko, "Islam and Politics in Central Asian States", *op. cit.*

¹⁷³ Murad Esenov, "The Anti-Terrorist Campaign and the Regional Security System". <http://www.ca-c.org/dataeng/esenov-anti-terror-campaign-IISS.shtml>, (Diakses pada tanggal 8 September 2007, pukul 17.41 WIB).

¹⁷⁴ "National Security Concept of the Russian Federation", *op. cit.*

merasa perlu untuk memperkuat stabilitas kawasan dengan berpartisipasi dalam setiap proses untuk mengurangi dan membatasi ruang gerak dari kelompok terorisme tersebut.¹⁷⁵ Pemerintah Republik Federasi Rusia menganggap bahwa kehadiran jaringan terorisme internasional, selain, dapat mengganggu keamanan nasional Rusia, memiliki potensi untuk mengganggu stabilitas kawasan. Untuk itu, Rusia kemudian menyerukan kepada seluruh negara di kawasan agar meningkatkan kerjasama di tingkat kawasan untuk menjamin keamanan bagi warga negara, wilayah teritorial, dan kedaulatan setiap negara di kawasan.¹⁷⁶

B.2. Peranan Aktor-Aktor Ekstra-Kawasan dan Ancaman bagi *Status Quo* Rusia

B.2.1. Kepentingan AS dan NATO

Kepentingan dan peranan Amerika Serikat (AS) di kawasan *post-Soviet Area*, khususnya di kawasan Asia Tengah dan Kaukasus, dapat dikatakan didasari oleh dua kepentingan mendasar: kepentingan ekonomi untuk mendapatkan bagian dari sumber minyak dan gas alam di Laut Kaspia, dan kepentingan politik-keamanan untuk memonitor keberadaan dan perkembangan beberapa poros kekuatan yang secara geografis memiliki kedekatan dengan wilayah tersebut, yakni Rusia, RRC, India, dan Iran.¹⁷⁷ Peran AS di kawasan ini semakin menguat pasca bubarnya Uni Soviet, dimana AS menganggap bahwa kawasan ini adalah merupakan kawasan "tak bertuan" yang dapat menjadi sumber bahaya di masa mendatang bagi AS apabila segala potensi atas kawasan ini tidak "dikelola" dengan benar.¹⁷⁸ Dalam melaksanakan politiknya di kawasan ini, AS dapat bergerak sendiri maupun bersamaan dalam kerangka kerjasama *North Atlantic Treaty Organization* (NATO).

Dalam strategi global AS, kawasan Asia Tengah menempati posisi strategis. Kepentingan AS di kawasan ini tidak terlepas dari kepentingan atas kekayaan energi yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tengah. Di antara negara-negara Asia Tengah, Kazakhstan merupakan negara yang paling besar

¹⁷⁵ "The Foreign Policy Concept of Russian Federation", *op. cit.*

¹⁷⁶ *ibid.*

¹⁷⁷ Martha Brill Olcott, "The Great Powers in Central Asia", <http://www.cagateway.org/downloads/SCO-04-1.pdf>. (Diakses pada tanggal 8 September 2007, pukul 17.41 WIB).

¹⁷⁸ *ibid.*

memiliki kandungan minyak setelah negara tersebut memperoleh wilayah Kaspia yaitu sebesar 85 milyar barel sementara Turkmenistan 32 milyar barel. Sementara proses eksplorasi minyak mentah di kedua kawasan tersebut selama masa pendudukan Uni Soviet baru berkisar 1-5 milyar barel. Sementara Laut Kaspia juga diperkirakan menyimpan kandungan gas alam sebesar 236-337 *trilyun cubic feet* yang juga merupakan sumber daya yang potensial bila dibandingkan kandungan gas alam di AS yang berjumlah 300 *trilyun cubic feet*.¹⁷⁹ Uzbekistan diperkirakan menyimpan 110 *trilyun cubic feet* gas alam dan Kazakhstan 88 *trilyun cubic feet* sedangkan Uzbekistan juga memiliki kandungan gas alam walaupun tidak memiliki wilayah Laut Kaspia yaitu sebesar 35 *trilyun cubic feet*.

Wakil Presiden AS Dick Cheney pada pidato di depan Pengusaha Minyak di Washington DC pada tahun 1998 (saat itu Cheney masih menjabat sebagai CEO dari Perusahaan Pemasok Minyak, Halliburton) mengatakan bahwa tidak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa secara tiba-tiba muncul sebuah wilayah yang sangat strategis dan signifikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasokan energi yaitu Laut Kaspia.¹⁸⁰ Kebutuhan akan energi terutama minyak mentah kemudian menjadi prioritas politik global AS di bawah kepemimpinan Presiden George W. Bush. Pada bulan Mei 2001 Dick Cheney kembali berpidato di depan para pelaku bisnis khususnya bisnis energi minyak bahwa dalam 25 tahun mendatang keamanan pasokan energi menjadi prioritas dari kebijakan perdagangan dan politik luar negeri AS. Karena itulah wilayah Laut Kaspia akhirnya menjadi salah satu sasaran pengamanan pasokan energi AS karena diperkirakan pada tahun 2015 Laut Kaspia akan menyumbang 5-8% dari produksi minyak dunia.

Kehadiran AS di kawasan bekas Uni Soviet juga terpresentasikan melalui keterlibatannya di dalam misi-misi yang dilakukan oleh NATO di kawasan ini semenjak bubarnya Uni Soviet. Pada bulan Januari 1994 NATO mengumpulkan seluruh kepala-kepala negara dari *New Independent States* (NIS), yaitu negara-negara pecahan Uni Soviet yang baru merdeka, untuk membahas pembentukan mekanisme kerjasama keamanan dalam skala besar melalui kerangka

¹⁷⁹ *ibid.*

¹⁸⁰ Sergey Gretskey, "Russia's Policy Toward Central Asia", *op.cit.*

Partnership for Peace (PfP). Segenap negara-negara baru merdeka tersebut, kecuali Tajikistan, menyetujui dan menandatangani konsepsi kerjasama dengan NATO tersebut dan memulai langkah-langkah untuk melakukan modernisasi atas artileri militernya dalam kerangka PfP.¹⁸¹ Dengan Rusia, NATO menjalin kemitraan strategis dengan penandatanganan *Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian Federation* di Paris, Perancis.

Pada pertengahan tahun 1990-an NATO memperluas wilayah "tanggung jawab" nya (*NATO's Area of Responsibility*) yang awalnya hanya meliputi wilayah Eropa menjadi wilayah Euro-Atlantik.¹⁸² Konsekuensi dari perubahan tersebut adalah diadopsinya kebijakan perluasan keanggotaan NATO ke wilayah negara-negara Eropa Timur dan Tengah, termasuk ke negara-negara *post-Soviet States*. Perluasan keanggotaan NATO yang pertama terjadi pada tahun 1999 dengan diterimanya Republik Ceko, Hungaria, dan Polandia kedalam organisasi tersebut. Kemudian, pada tahun 2004 NATO kembali menambah jumlah anggotanya dengan menerima tujuh negara Eropa Timur dan Tengah yakni Bulgaria, Latvia, Estonia, Lithuania, Rumania, Slovakia, dan Slovenia. Dua gelombang perluasan keanggotaan NATO tersebut dipandang oleh Rusia sebagai "ekspansi terencana" untuk mengacaukan stabilitas strategis dan mengurangi lingkup pengaruh potensial Rusia atas negara-negara tersebut. Bergabungnya negara-negara Baltik ke dalam NATO bagi Rusia adalah merupakan ancaman langsung bagi keamanan nasional Rusia, terutama karena negara-negara tersebut berbatasan langsung dengan Rusia.¹⁸³

B.2.2. Uni Eropa di *post-Soviet States Area*

Kehadiran Uni Eropa (UE) di kawasan *post-Soviet States* telah dimulai semenjak periode awal bubarnya Uni Soviet, yakni dengan diinisiasikannya program *Technical Aid to the Commonwealth of Independent States* (TACIS) pada tahun 1991. Program ini memberikan bantuan finansial untuk 12 negara Eropa Timur dan Asia Tengah, yaitu Armenia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia,

¹⁸¹ Borys Parakhonsky, "Central Asia: Geostrategic Survey", *op. cit.*

¹⁸² Mikhail Kokeyev. "Russia-NATO Relations: Between the Past and the Future", *Russia in Global Affairs* Vol. 3 No. 2, April-June 2007, (Moscow: Foreign Policy Research Foundation, 2007), hlm. 91-94.

¹⁸³ *ibid.*

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Rusia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraina, dan Uzbekistan yang mencakup pembiayaan pembangunan pada level nasional maupun kawasan pada sektor seperti keamanan nuklir, kerjasama lintas-batas, dan kerjasama kawasan.

Selain melalui TACIS, UE juga mengembangkan bentuk hubungan bilateral dengan negara-negara di Eropa Timur dan Asia Tengah melalui *Partnership and Co-operation Agreements (PCAs)*. Perjanjian ini adalah merupakan kesepakatan yang berlaku dalam jangka waktu 10 tahun antara UE dengan negara bersangkutan dalam hubungan politik, ekonomi, dan perdagangan, yang dibangun berdasarkan penghormatan pada prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁸⁴ Negara-negara yang telah menandatangani PCAs dengan UE diantaranya adalah Armenia (tahun 1999), Azerbaijan (1999), Georgia (1999), Kazakhstan (1999), Kyrgyzstan (1999), Moldova (1998), Rusia (1997), Ukraina (1998), dan Uzbekistan (1999).

Kepentingan UE untuk mengembangkan relasi positif dengan negara-negara *post-Soviet States* terutama berkenaan dengan hubungan ekonomi, perdagangan, dan energi. 76 persen pasokan energi UE tergantung dari suplai eksternal. Suplai ini termasuk 20 persen impor minyak dunia untuk UE, konsumsi ini lebih kecil dibandingkan dengan AS yang mencapai 26 persen. Kondisi ini menyebabkan UE sangat rentan terkena dampak krisis ekonomi dunia yang dapat ditimbulkan oleh kenaikan harga minyak ataupun kelangkaan persediaan minyak dunia.¹⁸⁵ Rusia adalah penyuplai seperempat minyak dan lebih dua perlima gas ke Eropa. Oleh sebab itu, UE secara intens berupaya untuk mengembangkan hubungan baik dengan Rusia dan negara-negara *post-Soviet* lainnya.

¹⁸⁴ Tatyana Valovaya, "The Post-Soviet Space in the Era of Pragmatism", *Russia in Global Affairs* Vol. 3 No. 2, April-June 2005, (Moscow: Foreign Policy Research Foundation, 2005), hlm. 114-115.

¹⁸⁵ Mikhail Kokeyev, "Russia-NATO Relations: Between the Past and the Future", *op. cit.*